

**COMPARISONAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE RATIO OF DKI JAKARTA PROVINCE  
BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono**

Universitas Tidar

Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Email: [dilamanika@gmail.com](mailto:dilamanika@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the comparison of the financial performance ratios of the DKI Jakarta Provincial Government, namely the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio before and during the Covid-19 pandemic. In this study, secondary data is used, namely the annual report of the DKI Jakarta Provincial Government from 2010 to 2020 as the research sample. In testing the data using a different test with SPSS 23 being the tool used to analyze the data. From the results of the data analysis carried out, it was found that there were significant differences in the ratio of effectiveness and the ratio of capital expenditure activities before and during Covid-19. Then the results of the different test with SPSS 23 on the independence ratio, efficiency ratio, and growth ratio found no significant differences before and during the Covid-19 pandemic on the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government.*

**Keywords** : *Regional Financial Performance Ratio, Covid-19 Pandemic, Regional Government.*

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM  
DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan rasio kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai tahun 2020 digunakan sebagai sampel penelitian. Dalam menguji data menggunakan Uji beda dengan SPSS 23 menjadi alat yang digunakan untuk menganalisis data. Dari hasil analisis data yang dilakukan mendapatkan adanya perbedaan perbandingan yang signifikan pada rasio efektivitas dan pada rasio aktivitas belanja modal sebelum dan pada saat Covid-19. Kemudian hasil pengujian Uji beda dengan SPSS 23 pada rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta.

**Kata kunci** : *Rasio Kinerja Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah.*

## PENDAHULUAN

Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun terberat untuk Indonesia karena terjadi fenomena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak terjadinya perubahan yang sangat signifikan dalam beberapa aspek. Khususnya dibidang perekonomian menjadi terhambat yang mengakibatkan terganggunya berbagai bidang kehidupan lainnya. Karena itu dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan terjadi *refocusing* dan realokasi di berbagai bidang yang diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona* dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hal ini dilakukan sehingga dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang muncul. Karena pandemi Covid-19 berdampak terhadap APBD pemerintah daerah karena tidak dapat dikelola sesuai dengan perencanaan anggaran sebelumnya (Mutia Agnika, 2021).

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah mengelola APBD dengan baik maka dilakukan pengukuran kinerja APBD. Dalam pengukuran kinerja diperlukan analisis kinerja keuangan agar mendapatkan informasi mengenai potensi kinerja keuangan (Labi, 2019). Dilakukannya analisis ini untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan anggaran dan mengukur pencapaian atas pemerintah daerah lakukan (Arni Karina, 2016).

Analisis kinerja keuangan perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bertujuan mengetahui apakah penggunaan anggaran telah optimal, diketahui Provinsi DKI Jakarta mengalami *recofusing* mencapai 10,64 triliun hasil alokasi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran yang telah didapatkan kemudian dialokasikan 1,6 triliun rupiah untuk penanganan kesehatan, kemudian penanganan dampak ekonomi sebesar 1,3 triliun rupiah, jaringan pengamanan sosial sebesar 325 miliar rupiah dan dana hibah atau bantuan sosial sebesar 6,2 triliun rupiah. Terjadi banyak perubahan anggaran terutama pada pos belanja hal ini disebabkan karena adanya pandemi. Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan dana belanja yang telah diberikan untuk kepentingan penanganan COVID-19. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja daerah membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program agar berjalan secara optimal sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan yang diberikan.

Didasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arni Karina dkk. (2016) memiliki objek penelitian yang sama yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan tahun anggaran 2010-2012, hasil dari penelitian tersebut bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rata-rata rasio kemandirian dikategorikan baik, rasio efektivitas PAD sangat efektif, rasio efisiensi belanja daerah tergolong kriteria kurang efisien, rasio aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, dan rasio pertumbuhan mengalami kenaikan. Kemudian penelitian yang dilakukan Muhammad Naufal Sya'ban pada karya ilmiahnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2019 Diukur Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi mendapatkan hasil penelitian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio kemandirian dikategorikan sedang, rasio efektivitas termasuk kriteria cukup efektif dan pada rasio efisiensi termasuk kriteria kurang efisien.

Pendapatan dan belanja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami banyak perubahan karena terjadinya Covid-19 tetapi berdasarkan *website* BPK RI (<https://jakarta.bpk.go.id/>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020 yang dapat diartikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan anggaran dengan baik. Didasarkan fenomena yang terjadi sehingga dilakukannya penelitian mengernai perbandingan rasio kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sebelum dan pada saat Covid-19.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kebijakan Publik

Syafiie (2006:104) menyatakan “kebijakan (*policy*) baiknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Biasanya para pejabat yang memiliki wewenang mengatur pelaksanaan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi hal ini disebut dengan kebijaksanaan. Maka dari itu Syafiie mengartikan bahwa jawaban dari suatu masalah kemudian untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah adanya hal buruk yang sebaliknya akan jadi inovasi, menarik, dan pemuka menggunakan cara terbaik dan tindakan yang terarah.” Adanya penerapan kebijakan merupakan cara bagaimana penerapan dari kebijakan tersebut akan menghasilkan keberhasilan dari proses suatu kebijakan yang penggunaannya untuk alat manajemen hukum. Kebijakan publik menjadi variabel yang terpenting dalam pengimplementasiannya dan keberhasilan suatu kebijakan publik terdapat pengaruh yang signifikan terkait dengan permasalahan publik (Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, 2016). Kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah pusat di saat terjadinya pandemi Covid-19 bertujuan memulihkan perekonomian yang sempat terhenti. Anggaran yang diberikan difokuskan untuk menangani sektor yang terdampak wabah covid-19. Hal tersebut dilihat dari dikeluarkannya kebijakan publik Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yaitu memberikan instruksi agar melakukan *recofusing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

### Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang. Setiap tahun, dalam mengelola keuangan daerahnya diwujudkan dengan ditetapkannya Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai peraturan daerah. APBD mencakup mengenai anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### Kinerja Keuangan

Kinerja (*Performance*) merupakan kegiatan yang diukur dalam suatu entitas pada periode tertentu sebagai bentuk tercapainya target. Dengan kinerja keuangan juga dapat dilihat kondisi keuangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki daerah tersebut sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dengan menggunakan anggaran yang didapat. Menurut Halim (2016:24) untuk mengukur kesanggupan suatu daerah dalam mengelola sumber daya pada daerahnya dapat diketahui dari kinerja keuangan daerah. Prof. Dr. Mardiasmo menyatakan (2018:151) dalam hal melayani masyarakat umum akuntabilitas organisasi dan manajer menjadi hal yang penting dan mempengaruhi pengukuran kinerja keuangan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah bagaimana anggaran tersebut dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

### Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Abdul Halim (2012) ada beberapa cara untuk menganalisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan dan APBD dapat dijadikan sumber menggunakan data keuangan dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio belanja daerah.

#### 1) Rasio Kemandirian

Kemandirian daerah (otonomi fiskal) memberikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah melakukan pembiayaan kegiatan pemerintahan serta menunjukkan ketergantungan suatu daerah dalam mendapatkan sumber dana dari pemerintah pusat maupun dari provinsi (Azhari, 2017). Untuk menunjukkan kemandirian suatu daerah dapat dilakukan dengan dibandingkan pendapatan asli daerah dari sumber yang lain. Mahmudi (2016:140) menyatakan kemandirian suatu daerah dapat diketahui dengan menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari hasil rasio dapat diketahui kemampuan keuangan suatu daerah dalam mengelola keuangan :

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>26-50	Konsultatif
Sedang	>51-75	Partisipatif
Tinggi	>76-100	Delegatif

Sumber: Halim (2002)

Menurut Halim (2002) dapat dijelaskan pola hubungan kemandirian suatu daerah dari tabel tersebut memiliki hubungan sebagai berikut : (1). Instruktif artinya dalam pengelolaan daerah pemerintah pusat mendominasi dalam pembiayaan daerah. (2). Konsultatif yaitu pemerintah pusat hanya memberikan konsultasi dan tidak terlalu ikut campur. (3). Partisipatif artinya dalam mengelola daerah pemerintah pusat berkurang karena daerah otonom telah mampu mengelola daerahnya. (4). Delegatif yaitu pemerintah pusat sudah tidak lagi ikut campur hal ini dikarenakan daerah telah mandiri serta mampu mengelola daerahnya sendiri.

#### 2) Rasio Efektivitas PAD

Dengan rasio efektivitas menjelaskan kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan sebelumnya dibandingkan dengan target pencapaian yang telah ditetapkan didasarkan oleh potensi *riil* daerah. Adapun rumus menghitung rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Hasil rasio yang telah didapatkan diartikan sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan	Efektivitas PAD (%)
Sangat efektif	>100
efektif	100
Cukup efektif	90 - 99
Kurang efektif	75 - 89
Tidak efektif	<75

Sumber: Mahmudi (2019)

### 3) Rasio Efisiensi

Efisiensi keuangan suatu daerah dilihat dari jumlah dari biaya yang digunakan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang didapatkan. Dalam menilainya apabila hasilnya rendah maka kinerja pemerintah daerah dapat dianggap efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan Keuangan	Efisiensi PAD (%)
Sangat Efisien	<60
Efisien	>60-80
Cukup efisien	>80-90
Kurang efisien	>90-100
Tidak efisien	>100

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

### 4) Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan pemerintah yang mendahulukan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada rasio aktivitas sangat dipengaruhi pembangunan atau perubahan yang terjadi maka dari itu belum ada yang menjadi tolak ukur APBD ideal untuk memenuhi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk tercapainya target pertumbuhan yang telah menjadi tujuan.

### 5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Suatu daerah harus mampu dalam mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan yang telah tercapai dari satu periode ke periode selanjutnya maka dari itu rasio pertumbuhan PAD diperlukan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini Untuk menemukan fakta dan kemudian melakukan pengembangan fakta tersebut dan diuji kebenarannya dengan mengumpulkan lalu menganalisis data yang diperoleh secara cermat, jelas, serta tersusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Sugiyono (2014:54) mengartikan bahwa jenis penelitian komparatif yaitu penelitian dengan cara membandingkan dua sampel berbeda atau lebih atau dari satu waktu ke waktu lainnya yang berbeda.

### **Populasi dan Sampel**

Unit analisis yang memiliki sifat diduga disebut dengan populasi. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kewajiban dalam membuat laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2020 menjadi sampel yang digunakan. Dan bagian yang berguna untuk keperluan penelitian populasi dan aspek-aspeknya.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang pertama kali dan diolah serta sebagai informasi tambahan yang diperoleh peneliti atau bersumber dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, *website*, atau sumber pendukung yang lain. Penggunaan data sekunder pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2010 hingga tahun 2020 serta sumber lainnya yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada *website* (<https://ppid.jakarta.go.id/>). Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan dan yang didapatkan secara tidak langsung tetapi berasal dari internet atau *website* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berisikan laporan realisasi anggaran pada tahun 2010-2020.

### **Teknik Analisis**

Uji beda T-test digunakan untuk menganalisis pada dua data yang berpasangan, dilakukan uji ini agar dapat mengetahui adanya perbedaan rata-rata di antara pasangan atau sampel terkait. Untuk membandingkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat Pandemi COVID19. Kriteria dari uji t (Ghozali, 2016) adalah sebagai berikut :

Apabila nilai signifikansi mendapatkan nilai uji  $t > 0,05$  maka dapat dikatakan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Apabila nilai signifikansi mendapatkan nilai uji  $t < 0,05$  maka dapat dikatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Data Penelitian**

Berdasarkan sumber data yang telah diperoleh oleh peneliti yang kemudian data tersebut dihitung menggunakan rumus rasio kinerja keuangan sehingga memperoleh hasil seperti berikut:

Tahun	Rasio kemandirian	Rasio efektivitas	Rasio efisiensi	Rasio aktivitas (X4)	
	(X1)	(X2)	(X3)	belanja modal	Belanja Operasi
2010	126,86%	104,68%	93,6%	24,33%	75,67%
2011	170,04%	109,49%	93,38%	27,69%	72,31%
2012	165,14%	107,39%	89,2%	27,83%	72,16%
2013	233,07%	102,08%	96,92%	27,92%	72,04%
2014	257,18%	78,66%	86,52%	27,54%	72,45%
2015	389,77%	88,72%	96,49%	23,96%	75,98%
2016	241,54%	95,8%	87,23%	19,1%	80,88%
2017	231,44%	105,31%	78,24%	21,77%	78,19%
2018	242,66%	97,69%	99,71%	23,12%	76,87%
2019	314,1%	89,89%	102,88%	18,02%	81,97%
2020	220,57%	98,23%	92,53%	6,13%	87,76%

tahun	Pertumbuhan PAD (X5)
2010 – 2011	38,27%
2011 – 2012	23,64%
2012 – 2013	21,82%
2013 – 2014	16,46%
2014 – 2015	7,71%
2015 – 2016	9,5%
2016 – 2017	19,01%
2017 – 2018	-1,3%
2018 – 2019	5,49%
2019 – 2020	-18,14%

Tabel 1. Sumber data sekunder, diolah

**Analisis Data****Uji Beda Paired Sample T-Test**

Tujuan dilakukannya pengolahan data agar dapat mengetahui perbandingan rasio kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 melalui uji rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan menggunakan analisis uji beda *paired sample t-test* dengan SPSS versi 23 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Hasil Uji Beda t-test Rasio Kemandirian (Paired Sample T-Test)**

		Paired Samples Test					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
Pair		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1	Kemandirian_sbl - kemandirian_saat	2246.0	10322.24479	729.9	-90496.58837	94988.58837	308	1	.810

*Tabel 2. Analisis Uji beda Rasio Kemandirian*

Hasil uji beda yang ditunjukkan pada tabel 2 dapat diketahui rasio kemandirian Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19 memperoleh *Sig (2-tailed)*  $0,810 > 0,05$  artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan.

**Hasil Uji Beda T-test Rasio Efektivitas (Paired Sample T-Test)**

		Paired Samples Test					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
Pair		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1	efektivitas sebelum - efektivitas saat	97682.00	2814.28499	1990.0	72396.65258	122967.34742	49.086	1	.013

*Tabel 3. Analisis Uji Beda Rasio Efektivitas*

Hasil uji beda yang ditunjukkan pada tabel 3 sehingga diketahui rasio efektivitas Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19 memperoleh *Sig (2-tailed)*  $0,013 < 0,05$  artinya adanya perbedaan yang signifikan.

Hasil Uji Beda T-test Rasio Efisiensi (*Paired Sample T-Test*)

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	efisiensi sebelum - efisiensi saat pandemi	-4633.5	6672.966	4718.5	-64587.727	55320.727	-0.982	1	.506

Tabel 4. Analisis Uji Beda Rasio Efisiensi

Pada hasil uji beda tabel 4 memperoleh tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio efisiensi Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat covid-19 memperoleh *Sig (2-tailed)*  $0,506 > 0,05$ .

Hasil Uji Beda T-test Rasio Aktivitas (*Paired Sample T-Test*)

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	aktivitas belanja modal sebelum - aktivitas belanja modal saat	1393.5	1078.337	762.5	-8294.9811	11081.98111	1.828	1	.019

Tabel 5. Analisis Uji Beda Rasio Aktivitas Belanja Modal

Hasil uji beda yang ditunjukkan pada tabel 5 dapat diketahui adanya perbedaan yang signifikan pada rasio Aktivitas belanja Modal Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat covid-19 dengan memperoleh *Sig (2-tailed)*  $0,019 < 0,05$ .

		Paired Samples Test					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
Pair		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1	aktv belanja operasi sebelum - aktv belanja operasi saat	-1087.5	647.0027	457.5	-	4725.5886	-	1	.254
			0		6900.5886	7	2.377		
					7				

Tabel 6. Analisis Uji Beda Rasio Aktivitas Belanja Operasi (Paired Sample T-Test)

Hasil uji beda pada tabel 6 dapat diketahui tidak mengalami perubahan yang signifikan pada Aktivitas Belanja Operasi Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat covid-19 dengan memperoleh *Sig (2-tailed)*  $0,254 > 0,05$ .

#### Hasil Uji Beda T-test Rasio Pertumbuhan PAD (Paired Sample T-Test)

		Paired Samples Test					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
Pair		Mea n	Std. Deviatio n	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1	pertmbhn PAD sebelum- Pertmbhn PAD saat	3728.	636.39610	450.0	-	9445.7921	8.284	1	.076
		0			1989.7921	3			
					3				

Tabel 7. Analisis Uji Beda Rasio Pertumbuhan PAD

Hasil uji beda rasio Pertumbuhan PAD Pemprov DKI Jakarta pada tabel 7 menyatakan bahwa pada saat sebelum dan pada saat covid-19 memperoleh *Sig (2-tailed)*  $0,076 > 0,05$  artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan.

#### PEMBAHASAN

##### Perbandingan Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi COVID19

Analisis data yang dilakukan mendapatkan hasil pada uji berpasangan bahwa rasio kemandirian tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hal tersebut dapat dikatakan karena memperoleh hasil 0,810 yang di mana lebih dari 0,05 artinya terjadinya pandemi covid-19 tidak terlalu membawa dampak yang besar bagi kemandirian dari Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dananya. Temuan ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan (Fitri Rahmawati, 2022) menyatakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada kemandirian suatu daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19. Pada rasio kemandirian baik sebelum ataupun pada saat Covid-19 mendapatkan rata-rata dengan menghasilkan pola hubungan yang sama yaitu pola hubungan efektif diketahui bahwa rasio kemandirian Pemerintah

ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu melebihi 100%. Dengan begitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mampu mendanai daerahnya atau mengelola daerah otonomnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan tidak bergantung pada bantuan pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta mampu mengelola daerah menggunakan PAD yang didapatkan pada masa pandemi Covid-19.

#### **Perbandingan Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi COVID19**

Pengujian yang dilakukan pada rasio efektivitas mendapatkan hasil 0,013 yang di mana kurang 0,05 yang artinya mendapatkan hasil signifikan pada saat sebelum dan saat terjadinya Covid-19. Apabila dianalisis dari data yang diperoleh berdasarkan Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam penggunaan dana yang mengakibatkan realisasi dari dana pendapatan asli daerah yang kurang maksimal dalam penggunaan anggaran di tahun 2020 sehingga terealisasi sebesar 98,24%. Dari rata-rata rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 98,3% artinya pandemi Covid-19 berdampak pada efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kurang efektifnya dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan dan terjadinya perubahan regulasi yang dilakukan seperti penerapan PSBB (Pembatasan sosial Berskala Besar) yang mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah dapat menjadi alasan penghambat berjalannya program Pemprov DKI Jakarta terkhususnya pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

#### **Perbandingan Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi COVID19**

Rasio efisiensi memperoleh 0,506 lebih dari 0,05 yang menyatakan memiliki beda yang signifikan pada rasio efisiensi kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat terjadinya covid-19. Rata-rata rasio efisiensi memperoleh 92,41% sehingga dapat dikatakan mengalami kenaikan. Pada data penelitian di atas rasio efisiensi tahun 2020 memperoleh persentase 92,53% yang artinya masih kurang efisien karena semakin kecil persentase yang diperoleh maka semakin efisien. Terjadinya kurang efisien dikarenakan Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena menggunakan anggaran cukup besar. Untuk menghadapi covid-19 Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran cukup besar hal ini dilakukan dalam mengatasi kerugian atau masalah yang terjadi selama pandemi covid-19.

#### **Perbandingan Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi COVID19**

Pada hasil yang diperoleh pada rasio aktivitas belanja modal menunjukkan hasil 0,019 kurang dari 0,05. Artinya aktivitas belanja modal Pemprov DKI Jakarta dikatakan signifikan pada saat sebelum dan pada saat covid-19. Hasil rata-rata rasio aktivitas belanja modal yang memperoleh 24,12% sehingga mengalami penurunan. Hasil yang didapatkan didukung dengan penelitian yang dilakukan (Fitri Rahmawati, 2022) dalam hasilnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan aktivitas belanja modal yang signifikan sebelum dan selama pandemi covid-19. Kemudian hasil dari rasio aktivitas belanja operasi memperoleh hasil 0,254 lebih dari 0,05 yang artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Dengan diperoleh hasil rata-rata pada rasio aktivitas belanja operasi sebesar 69,85% artinya mengalami kenaikan. Dilakukannya *Recofusing* APBD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan belanja operasi memperoleh alokasi dana sebesar 33,63 triliun rupiah kemudian terjadi penurunan pada belanja modal yang pada awalnya mendapatkan alokasi dana sebesar 44,93 triliun menjadi 25,14 triliun rupiah. Terjadinya penurunan belanja modal ataupun belanja operasi dilakukan untuk penanganan covid-19. Namun yang paling terlihat perbedaan signifikan pada aktivitas belanja modal yang di mana dana dialokasikan sehingga Pemprov DKI Jakarta sedikit sulit untuk menambah aset atau infrastruktur daerahnya. Alokasi anggaran ditambahkan ke anggaran belanja tidak terduga sehingga mengalami peningkatan anggaran yang semula 188 miliar rupiah menjadi 5,19 triliun rupiah. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat dalam menangani covid-19 khususnya pada aspek kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

#### **Perbandingan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi COVID19**

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh pada rasio pertumbuhan PAD mendapatkan hasil 0,076 lebih dari 0,05. Berdasarkan penghitungan rasio pertumbuhan PAD, rata-rata yang diperoleh sebesar 14,06% sehingga dapat dikatakan terjadi penurunan. Tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mempertahankan pendapatan pada saat pandemi covid-19. Keseimbangan faktor anggaran yang diterima dengan anggaran belanja yang dikeluarkan menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah baik dibuktikan dengan dikeluarkannya opini BPK tahun 2019 dan 2020 menunjukkan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian.

## PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan, sehingga penelitian ini memperoleh kesimpulan pada rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja operasi, dan rasio pertumbuhan PAD tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan masing-masing memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,810, 0,506, 0,254, dan 0,076. Sedangkan untuk rasio efektivitas dan rasio aktivitas belanja modal memperoleh hasil perbandingan yang signifikan pada sebelum dan pada saat Covid-19 dengan masing-masing memperoleh nilai signifikansi 0,013 dan 0,019.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan Pemprov DKI Jakarta mampu meningkatkan bahkan mempertahankan kemandirian daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Kemudian perlu diadakannya sosialisasi mengenai pembayaran pajak meski terdampak Covid-19 oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja akibat terdampaknya Covid-19 dengan peningkatan tenaga ahli agar dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan secara maksimal dan efektif.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mencari referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan dibahas sehingga dapat melakukan pengembangan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda maka hasil dan kesimpulan yang didapatkan memberikan keadaan yang sesuai dengan yang sebenarnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Abdul Halim, M. s. (2016). *Teori konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*. Jakarta: salemba empat.
- Arni Karina, D. N. (2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Azhari, F. R. (2017). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Tugas Akhir*.
- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran Yogyakarta. *Paris Review*.
- Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, A. M. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Hakim, R. N. (2020, Maret 31). *Kompas.com*. Retrieved from Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk atasi Covid-19, ini rinciannya: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya?page=2>
- Kurnia Ahsanul Habibi, S. I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se- Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19. *Majalah Neraca*.
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi V*, 1355-1370.
- Mardiasmo, P. D. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutia Agnika, S. S. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebelum dan saat pandemi covid-19. *Indonesian accounting Research Jurnal*, 493-503.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ramdhani, D. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 134-147.
- Sya'ban, M. N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2017-2019 diukur berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. *Tugas Akhir*.
- Syafii, I. K. (2006). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

